

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta, 2016.
- Aris Subagiyo, dkk, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil*, Univeristas Brawijaya, Malang, 2017.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kedua Belas, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Cst.Kansil, Cristine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Dini Susiani, *Hukum Tata Ruang*. Jawa Timur: CV Pustaka Abadi, Jawa Timur, 2020.
- Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* Ed. Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Lucky Adrianto, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015.

- Nandang Alamsah dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, Bandung, 2017.
- Patlis Jason M. dkk, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Bappenas, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, dalam Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana: Jakarta, 2013.
- Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Suryanti, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, UNDIP Press, Semarang, 2019.
- Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Kencana, 2017.
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, 2014.

## **Jurnal**

- Andi Husnul Khatimah dkk, *Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa*, Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, 2018.
- Dian Artika Arfah, *Nelayan Lonrae Kabupaten Bone 1975-2017*, Patingalloang Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan Volume 6, 2019.
- Ernan Rustiadi, *Potensi dan Permasalahan Kawasan Pesisir Berbasis Sumberdaya Perikanan dan Kelautan*, makalah yang disampaikan pada Pelatihan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu,

kerjasama Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Bogor, 2014.

Henry Sinaga, *Disharmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Sektoral Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Disertasi Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Lucky Adrianto, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015.

Muhammad Ilham Arisaputra, *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Jurnal Perspektif Hukum Volume 15 Nomor 1, 2015.

Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Buku Pintar Kementerian Kelautan dan Perikanan*.

Rahman Syamsuddin, *Keadilan Bermartabat Pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018.

Rahmat Datau, *Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Gorontalo Law Review Volume 2 Nomor 2, 2019.

R. Pamekas, *Model Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Permukiman*, Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2018.

Rokhmin Dahuri dan Iwan Nugroho dalam, Muhammad Mahrus Ali dkk, *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu*, Jurnal Konstitusi Volume 17 Nomor 4, 2020.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Perpres No.51/2016: Pemerintah Provinsi Wajib Tetapkan Batas Sempadan Pantai*, 2016.

Sukmariningsih, R, *Overlapping Authority on the Cancellation of Local Regulation (An Erroneous Logic of Local Autonomy)*. Hasanuddin Law Review, 2017.

Sulasi Rongiyati, *Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018

Usep Setiawan, "Kejutan Manis di Hari Tanit", Kompas, 1 Oktober 2018

Waryanta, *Integrasi Penataan Pertanahan Dalam Kerangka Penataan Wilayah Pesisir dan Lahan Atas Terpadu*, Jurnal Bhumi Volume 2, 2016.

### **Tesis dan Disertasi**

Hamzah, *Model Pengelolaan Pencemaran Perairan Pesisir Bagi Keberlanjutan Perikanan dan Wisata Pantai Kota Makassar*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2012.

Henry Sinaga, *Disharmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Sektoral Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Disertasi Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Rahman Syamsuddin, *Keadilan Bermartabat Pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018.

### **Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Referensi Tambahan**

*Reforma Agraria Tidak Cukup Dengan Membagi Sertifikat Tanah Saja*, <https://nasional.kontan.co.id/>, diakses 14 Januari 2022.

Usep Setiawan, *“Kejutan Manis di Hari Tani”*, Kompas, 1 Oktober 2018, diakses 20 Januari 2022.

# LAMPIRAN



1 2 0 2 2 1 9 3 0 0 2 7 2 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27675/S.01/PTSP/2022  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
1. Bupati Bone  
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Bone

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 2039/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 01 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **REZKY AMALIA SYAFIIN**  
Nomor Pokok : B012201057  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul

**" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATAAN PERMUKIMAN NELAYAN YANG BERADA DI GARIS SEMPADAN PANTAI KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Maret s/d 09 April 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 07 Maret 2022

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth  
1. Direktur PPs Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.189/III/IP/DPMPTSP/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **REZKY AMALIA SYAFIIN**  
NIP/Nim/Nomor Pokok : B012201057  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Muslim Dg Tutu Kel. Parang Tambung  
Kec. Tamalate Kota Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATAAN PERMUKIMAN NELAYAN YANG BERADA DIGARIS SEMPADAN PANTAI KABUPATEN BONE ”**

Lamanya Penelitian : 09 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone, Lurah Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 07, Maret 2022  
**KEPALA,**  
**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**  
Rangkat Pembina Utama Muda  
Nip : 19620724 199003 1 008

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
5. Camat Tanete Riattang Timur Kab. Bone di Lonrae.
6. Lurah Lonrae Kec. Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
7. Arsip.